

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

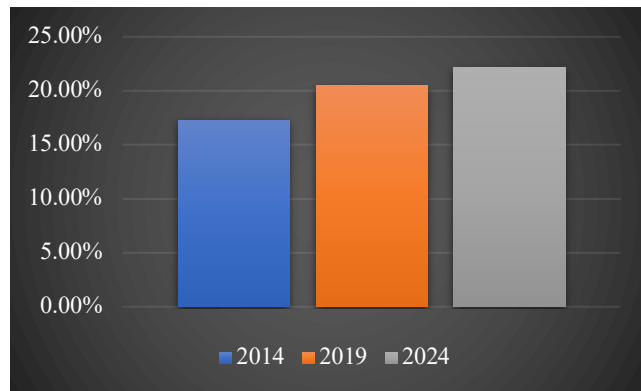
### **1.1. Latar Belakang**

Sejak penetapan UU Pemilu No 10 tahun 2008, pengaturan kuota perempuan dalam daftar calon yang diusulkan partai politik dalam pencalonan, tidak hanya sekurang-kurangnya 30%, tetapi juga nomor urut dalam daftar calon setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya ada satu perempuan. Meskipun ada kemajuan dalam jumlah kehadiran perempuan di lembaga legislatif, namun perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam dunia politik yang didominasi laki-laki. Sebuah studi oleh Mukarom (2008) menunjukkan bahwa perempuan dalam politik mengalami kenaikan tetapi belum mengalami perubahan signifikan, dengan keterwakilan perempuan yang masih rendah di parlemen, masih di bawah 30%.

Berdasarkan data dari BPS Indonesia (2024), sejak tahun 2014 konsisten terjadi peningkatan dalam persentase keterlibatan perempuan di parlemen. Pada tahun 2014, angka keterwakilan perempuan berada pada 17,32% dan meningkat signifikan hingga mencapai 20,52% di tahun 2019. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana persentase tersebut naik menjadi 22,14%.

Gambar 1. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Tahun 2014-2024



Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2025

Hal ini menjadi bukti bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, yang menandai transisi menuju sistem demokratis yang lebih terbuka dan inklusif. Reformasi ini membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan politik, termasuk menjadi anggota legislatif serta berpartisipasi dalam pemerintahan lokal dan nasional.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin kesetaraan gender dan memberikan hak yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Akan tetapi, realisasi jaminan ini dalam praktiknya masih jauh dari ideal. Perempuan sering kali kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional (Anwar, 2017). Meskipun perempuan hampir setengah dari populasi, persentase mereka dalam posisi pengambil keputusan politik jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tantangan seperti diskriminasi dan bias gender memengaruhi keterpilihan perempuan sebagai

kandidat oleh partai politik dan cara mereka diperlakukan oleh media serta masyarakat umum. Stereotip gender dan ekspektasi tentang peran tradisional perempuan sering kali mengurangi peluang mereka untuk terpilih, karena sebagian pemilih mungkin merasa kurang yakin dengan kemampuan kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan laki-laki (Lestari, 2020).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan diparlemen tidak hanya berdampak pada aspek kuantitatif, tetapi juga memperkaya substansi kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dapat mewakili golongannya dalam pengambilan proses kebijakan, karena menurut studi oleh Anderson dan Smith pada tahun 2012, tanpa keterwakilan yang memadai, banyak isu yang berkaitan dengan perempuan cenderung terabaikan oleh diskusi yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan sebagai legislator juga cenderung membawa perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya isu-isu yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup keluarga dan masyarakat (Nugraha, 2022). Isu seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, dan pengembangan anak menjadi prioritas utama yang cenderung diperjuangkan oleh legislator perempuan karena kedekatannya dengan realitas sosial yang mereka alami. Keterlibatan perempuan juga terbukti meningkatkan perhatian terhadap perlindungan hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kesetaraan di tempat kerja.

Dengan partisipasi aktif perempuan dalam proses legislasi, parlemen menjadi lebih representatif terhadap kebutuhan seluruh populasi, tidak hanya kelompok mayoritas. Dalam suasana politik yang masih didominasi laki-laki, kehadiran perempuan menjadi penting untuk mengangkat isu-isu yang selama ini cenderung terpinggirkan. Menurut Miller, dengan keterwakilan yang lebih baik, suara kelompok yang sebelumnya kurang diperhatikan dapat ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberadaan perempuan di lembaga legislatif tidak semata soal kesetaraan gender, melainkan juga sebagai strategi untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih adil, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Parker, 2019).

Studi juga menunjukkan bahwa parlemen dengan jumlah perempuan yang lebih seimbang cenderung menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih adil dan merata. Alokasi anggaran menjadi lebih berpihak kepada kebutuhan sosial, seperti cuti melahirkan, perlindungan pekerja perempuan, dan pendidikan anak usia dini (Davis & Green, 2020). Negara-negara dengan lebih banyak perempuan di parlemen terbukti lebih progresif dalam kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat (Smith & Johnson, 2022). Selain memperbaiki kebijakan anggaran, keterlibatan perempuan dalam parlemen juga meningkatkan kualitas demokrasi. Ketika berbagai perspektif dipertimbangkan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. Hal ini mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam parlemen artinya memaksimalkan potensi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan keterlibatan yang lebih luas, sistem pemerintahan menjadi lebih adil, demokratis, dan mampu mewakili kepentingan semua pihak (Davis & Green, 2018).

Peran gender dalam politik sering kali mengungkap bagaimana stereotip sosial terhadap politisi perempuan memengaruhi keterlibatan mereka dalam arena politik. Stereotip ini mencakup anggapan bahwa perempuan lebih cocok berperan dalam bidang "lebih lembut" seperti pendidikan, kesehatan, atau urusan sosial, daripada di arena politik yang kompetitif dan konfrontatif, yang sering dianggap sebagai "ranah laki-laki". Stereotip ini tidak hanya menghambat perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan, tetapi juga memengaruhi cara mereka dinilai oleh pemilih, media, dan rekan-rekan politik (Johnson & Brown, 2021). Misalnya, perempuan politisi sering kali dihadapkan pada ekspektasi ganda: mereka diharapkan untuk kuat dan tegas, tetapi jika menunjukkan sifat-sifat ini, mereka dapat dikritik sebagai terlalu agresif atau tidak feminim. Sebaliknya, jika mereka menunjukkan sikap lembut, mereka dapat dianggap tidak cukup kuat untuk dunia politik yang penuh tantangan.

Kondisi sosial yang sarat stereotip gender menciptakan hambatan psikologis dan profesional yang signifikan bagi perempuan yang ingin berkarir dalam dunia politik. Persepsi negatif dan stereotip gender dapat mengurangi peluang perempuan untuk dipilih dalam jabatan publik serta membatasi pengaruh mereka dalam

pengambilan keputusan politik meskipun mereka berhasil terpilih (Smith & Taylor, 2016). Stereotip ini mendiskreditkan kemampuan kepemimpinan perempuan berdasarkan gender, sehingga keterlibatan mereka dalam politik menjadi tidak maksimal. Stereotip gender dalam politik juga merugikan proses demokrasi karena mengurangi keragaman perspektif dalam pembuatan kebijakan. Ketika perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi atau ketika kontribusi mereka dinilai berdasarkan prasangka gender, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh populasi (Johnson & Brown, 2018).

Perempuan sering menghadapi serangkaian hambatan struktural dan kultural yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik. Hambatan-hambatan ini menghalangi perempuan tidak hanya dalam mencapai posisi kepemimpinan tetapi juga dalam berperan aktif dalam proses politik secara keseluruhan (Parker & Green, 2019). Dalam politik Indonesia, perempuan menghadapi hambatan struktural seperti terbatasnya akses terhadap sumber daya penting seperti pendanaan kampanye, yang krusial untuk visibilitas dan efektivitas kampanye mereka. Selain itu, perempuan mengalami kesulitan dalam memasuki jaringan politik yang sudah ada, yang umumnya didominasi oleh laki-laki dan penting untuk mendapatkan dukungan serta informasi strategis. Perempuan juga mendapatkan liputan media yang lebih sedikit dan terkadang bias, yang memengaruhi persepsi publik tentang kelayakan dan efektivitas mereka sebagai pemimpin (Taylor & Parker, 2022).

Secara kultural, norma-norma sosial di banyak komunitas Indonesia masih menempatkan perempuan dalam peran domestik yang membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam politik (Anderson & Green, 2022). Pemahaman gender yang konservatif sering kali memandang politik sebagai ranah yang tidak cocok untuk perempuan, mengecualikan mereka dari partisipasi aktif. Ekspektasi dan persepsi masyarakat yang stereotip menambah tekanan pada perempuan, menuntut mereka untuk membuktikan kemampuan mereka di atas standar yang diharapkan dari laki-laki, menciptakan hambatan tambahan yang tidak dihadapi oleh rekan laki-laki mereka (Smith & Lee, 2023).

Indonesia telah mengambil langkah progresif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dengan mengadopsi kebijakan kuota gender yang menetapkan bahwa setidaknya 30% dari kandidat yang diajukan oleh partai politik untuk pemilihan legislatif harus perempuan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 243 dan Pasal 245, yang mencerminkan komitmen terhadap pemberdayaan gender dalam politik dengan memastikan keterwakilan perempuan dalam proses legislatif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan gender yang historis dalam representasi politik dan memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat legislatif. Pengalaman legislatif sebelumnya menunjukkan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen, yang menjadi tantangan bagi calon perempuan dalam upaya memperjuangkan keterwakilan politik yang lebih inklusif.

Pengadopsian kebijakan kuota ini didasarkan pada pengakuan bahwa, meskipun perempuan membentuk hampir setengah dari populasi Indonesia, mereka secara signifikan kurang terwakili dalam politik. Kekurangan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga demokrasi secara keseluruhan, karena keputusan yang dibuat tanpa input yang memadai dari perempuan dapat gagal mencerminkan kebutuhan dan pandangan setengah dari populasi. Kuota ini dirancang untuk memastikan bahwa lebih banyak perempuan dapat memasuki arena politik, yang sebelumnya mungkin terhalang oleh berbagai hambatan struktural dan kultural. Dengan menetapkan persentase minimal, partai politik didorong untuk mencari dan mendukung kandidat perempuan, yang dapat mengubah dinamika dalam pemilihan dan secara bertahap mengubah komposisi gender dalam lembaga legislatif.

Kebijakan kuota juga mendorong partai-partai untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi kandidat perempuan, membantu mereka untuk bersaing secara efektif di pemilu dan menavigasi dunia politik yang sering kali didominasi oleh laki-laki. Selain itu, keberadaan lebih banyak perempuan di parlemen dapat mendorong perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender, menghasilkan legislasi yang lebih baik yang memperhatikan berbagai perspektif dan kebutuhan dalam masyarakat.

Menjelang Pemilihan Legislatif 2024, setiap daerah memiliki tantangan dan dinamika politiknya masing-masing yang turut mempengaruhi sejauh mana kebijakan afirmatif dapat diimplementasikan secara efektif. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah sekaligus basis kuat PDI Perjuangan, menjadi salah

satu wilayah yang menarik untuk dianalisis dalam konteks keterwakilan politik perempuan. Kota Semarang yang didominasi partai besar dengan berbagai strateginya menentukan peluang keterpilihan politisi perempuan dalam pemilu legislatif Kota Semarang tahun 2024. Dalam menghadapi persaingan politik yang semakin intens, di mana partai-partai politik berlomba untuk menarik dukungan pemilih. Isu-isu utama seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mendominasi agenda kampanye, menyoroti fokus masing-masing kandidat terhadap aspek kehidupan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam sektor infrastruktur, kandidat menjanjikan peningkatan dan perluasan fasilitas yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Di bidang pendidikan, program yang diusung bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui investasi yang lebih besar dalam sumber daya dan fasilitas pendidikan, serta meningkatkan ketersediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Sementara itu, sektor kesehatan menjadi prioritas utama, dengan janji memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk inisiatif preventif dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan terhadap kandidat legislatif di Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang etnis, agama, dan kondisi sosio-ekonomi pemilih, yang menciptakan pola dukungan yang kompleks dan beragam. Etnisitas dan agama sering kali menjadi faktor utama dalam preferensi politik, di mana pemilih cenderung memilih kandidat yang memiliki nilai dan identitas yang sama. Kandidat yang mengaitkan platform politiknya dengan nilai-nilai agama atau etnis

tertentu sering kali mendapatkan dukungan kuat dari kelompok pemilih yang merasa terwakili. Di sisi lain, faktor sosioekonomi juga memengaruhi keputusan pemilih. Kelompok dengan tingkat ekonomi lebih rendah cenderung lebih memprioritaskan isu-isu seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Mereka lebih mungkin mendukung kandidat yang menawarkan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan fasilitas dan layanan publik, yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, loyalitas partai tetap menjadi faktor signifikan, di mana pemilih dengan afiliasi politik yang kuat cenderung mendukung kandidat dari partai mereka sendiri, terlepas dari kebijakan individu yang diusung. Hubungan yang kompleks antara identitas, kondisi ekonomi, dan loyalitas partai membentuk dinamika politik unik di Kota Semarang. Oleh karena itu, strategi kampanye yang efektif harus memperhatikan keragaman sosial dan budaya masyarakat, guna menarik dukungan yang lebih luas.

Strategi politik menjelang Pemilu Legislatif 2024 di Kota Semarang tidak hanya berfokus pada kampanye individu, tetapi juga mencakup negosiasi dan pembentukan koalisi antarpantai. Proses ini bertujuan untuk menciptakan mayoritas yang kuat di dewan kota, yang sangat penting untuk pengesahan kebijakan serta implementasi agenda politik. Pembentukan koalisi antarpantai melibatkan proses kompromi dan tawar-menawar politik yang intens. Partai-partai harus menyepakati agenda bersama atau melakukan pembagian posisi kepemimpinan guna memperoleh dukungan yang cukup untuk menguasai dewan legislatif daerah. Selain itu, manajemen hubungan antarpantai pasca-pemilu menjadi aspek krusial dalam memastikan stabilitas koalisi, yang berdampak langsung pada efektivitas

pemerintahan. Kestabilan politik sangat menentukan kemampuan pemerintah kota dalam merespons kebutuhan warga dan melaksanakan kebijakan strategis. Dalam konteks politik yang fragmentaris dan kompetitif seperti di Kota Semarang, keterampilan dalam negosiasi politik dan strategi koalisi menjadi faktor kunci dalam menentukan kesuksesan legislatif serta efektivitas pemerintahan ke depan.

Meskipun jumlah nominasi perempuan dalam pemilihan legislatif mengalami peningkatan, mereka masih menghadapi tantangan berat untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kandidat perempuan adalah persepsi publik, yang sering kali masih dipengaruhi oleh stereotip gender dan ekspektasi tradisional terhadap peran perempuan. Salah satu bias yang kerap dihadapi perempuan dalam politik adalah keraguan terhadap kompetensi mereka. Stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lebih emosional atau kurang tegas membuat mereka sering dianggap tidak cukup mampu untuk memimpin, terutama dalam posisi politik strategis. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung mempercayai pemimpin laki-laki untuk posisi yang membutuhkan ketegasan atau kemampuan dalam mengambil keputusan cepat (Bincang Perempuan, 2022). Selain itu, dinamika kampanye juga memainkan peran yang krusial dalam keberhasilan kandidat perempuan. Akses terhadap strategi kampanye yang efektif serta sumber daya yang memadai sering kali lebih sulit bagi perempuan, mengingat keterbatasan mereka dalam jaringan politik dan dukungan finansial. Liputan media juga menjadi faktor yang dapat memperkuat bias gender, di mana kandidat perempuan lebih sering disoroti berdasarkan aspek-aspek personal seperti penampilan fisik, kehidupan pribadi, dan

peran tradisional gender, daripada fokus pada kualifikasi profesional atau platform kebijakan mereka. Misalnya, sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal *Journalism* pada November 2023 menemukan bahwa meskipun representasi perempuan dalam politik meningkat, bias gender dalam liputan media tetap ada, dengan perempuan lebih sering digambarkan dalam konteks stereotip tradisional (Journalism, 2023). Untuk meningkatkan peluang keterpilihan perempuan dalam politik, diperlukan pendidikan pemilih guna mengatasi bias gender serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keberagaman gender dalam pemerintahan. Selain itu, menurut *Transparency International Indonesia*, ketidakhadiran afirmasi dalam regulasi yang ada turut mempertahankan ketidaksetaraan dalam dunia politik, di mana politisi perempuan masih menghadapi kesenjangan dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mewajibkan partai politik mengalokasikan dana bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik perempuan, dengan besaran minimal 10% dari total dana bantuan keuangan yang diberikan oleh negara (Transparency International Indonesia, 2022). Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa di masa depan perempuan tidak hanya mengalami peningkatan dalam jumlah nominasi, tetapi juga dalam tingkat keterpilihan, sehingga dapat mengubah lanskap politik menjadi lebih inklusif dan mencerminkan komposisi sosial yang lebih akurat di Kota Semarang.

Menjelang Pemilihan Legislatif 2024, Kota Semarang menghadapi dinamika politik yang menarik, terutama terkait dengan fenomena dominasi petahana dari PDI Perjuangan (PDIP) dalam daftar calon legislatif (caleg). PDIP sebagai partai dominan di Kota Semarang kembali mencalonkan sebagian besar

anggota legislatif petahana, yang memberikan tantangan bagi proses regenerasi politik serta keterwakilan kelompok tertentu, termasuk perempuan dan kalangan muda. Pada Pemilu 2024, sebanyak 19 anggota legislatif petahana dari PDIP kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg), sementara 31 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) lainnya merupakan pendatang baru (Kompas, 2023). Dominasi petahana ini berdampak pada rendahnya kesempatan bagi kandidat baru untuk bersaing secara setara, terutama karena petahana memiliki akses yang lebih besar terhadap jaringan politik, sumber daya kampanye, dan kedekatan dengan konstituen (Jurnal Politik Indonesia, 2022).

Selain itu, dari perspektif keterwakilan perempuan, fenomena ini turut berkontribusi pada lambatnya peningkatan jumlah caleg perempuan yang memiliki peluang keterpilihan tinggi. Meskipun PDIP telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya, penempatan mereka dalam nomor urut yang kurang strategis tetap menjadi kendala (Tempo, 2023). Posisi nomor urut dalam daftar caleg sangat menentukan peluang keterpilihan, di mana caleg yang ditempatkan pada urutan bawah cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan afirmatif kuota perempuan telah diterapkan, masih diperlukan langkah lebih lanjut untuk memastikan perempuan tidak hanya masuk dalam daftar caleg, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih (Transparency International Indonesia, 2022).

Keunggulan petahana dalam dunia politik sering kali tidak hanya disebabkan oleh pengalaman legislatif yang lebih panjang, tetapi juga karena akses yang lebih besar terhadap sumber daya politik dan finansial. Banyak kandidat baru menghadapi kesulitan dalam menyaingi popularitas petahana, terutama karena mereka belum memiliki jaringan yang kuat serta sumber pendanaan kampanye yang mencukupi (Lee & Johnson, 2021). Akibatnya, pemilih sering kali lebih memilih kandidat yang sudah dikenal dan memiliki rekam jejak yang terbukti, dibandingkan dengan kandidat baru yang belum memiliki basis dukungan yang cukup. Dalam konteks ini, fenomena petahana di PDIP Kota Semarang tidak hanya mencerminkan tantangan regenerasi politik, tetapi juga menjadi hambatan bagi keterwakilan yang lebih inklusif dalam parlemen lokal.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih progresif dalam proses pencalonan caleg di Kota Semarang. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk meninjau kembali sistem penempatan nomor urut caleg, memastikan bahwa kandidat baru, terutama perempuan dan kaum muda memiliki kesempatan lebih adil untuk bersaing, serta meningkatkan transparansi dalam proses seleksi internal partai agar caleg yang dipilih benar-benar berdasarkan kapasitas dan komitmen mereka, bukan sekadar faktor kedekatan politik (Davis & Green, 2020). Dengan adanya reformasi dalam mekanisme pencalonan, diharapkan politik di Kota Semarang dapat menjadi lebih dinamis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman masyarakat dalam representasi legislatif.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan keterwakilan calon legislatif (caleg) di Kota Semarang, berikut disajikan data perbandingan daftar caleg pada Pemilu tahun 2019 dan 2024. Data ini mencakup informasi mengenai nama caleg, daerah pemilihan (dapil), dan jenis kelamin dari masing-masing calon. Penyajian ini bertujuan untuk melihat dinamika keterwakilan gender, sebaran calon di berbagai dapil, serta tren partisipasi politik dari tahun ke tahun. Berikut adalah data lengkapnya:

**Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Partai PDIP Kota Semarang**

| <b>Nama</b>                          | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Periode</b> | <b>Periode</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>Dapil 1</b>                       |                      |                |                |
| Supriyadi                            | Laki – Laki          | 2019-2024      | -              |
| Trifena Weyatin<br>Soehendro, S.Kom. | Perempuan            | 2019-2024      | 2024-2029      |
| Novi Sukmawati<br>Ayuningrum, S.E.   | Perempuan            | 2019-2024      | -              |
| Michel                               | Laki – Laki          | -              | 2024-2029      |
| <b>Dapil 2</b>                       |                      |                |                |
| Hanik Khoiru<br>Solikah              | Perempuan            | 2019-2024      | 2024-2029      |
| Dyah Ratna<br>Harimurti              | Perempuan            | 2019-2024      | -              |
| Rahmulyo<br>Adiwibowo                | Laki – Laki          | 2019-2024      | 2024-2029      |
| Meidiana Kuswara                     | Laki – Laki          | 2019-2024      | -              |
| Adi Subkan Ifana                     | Laki – Laki          | 2019-2024      | 2024-2029      |
| <b>Dapil 3</b>                       |                      |                |                |
| Lely Purwandari                      | Perempuan            | 2019-2024      | 2024-2029      |
| Bambang Sri<br>Wibowo                | Laki – Laki          | 2019-2024      | 2024-2029      |
| Dibyo Sutiman                        | Laki – Laki          | 2019-2024      | -              |
| <b>Dapil 4</b>                       |                      |                |                |
| Djoko Riyanto                        | Laki – Laki          | 2019-2024      | 2024-2029      |
| Nungki Sundari                       | Perempuan            | 2019-2024      | -              |
| Giyanto                              | Laki – Laki          | 2019-2024      | 2024-2029      |

| <b>Nama</b>                              | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Periode</b>          | <b>Periode</b>          |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Yosi Yonardo<br>Garneda Rendra<br>Putera | Laki – Laki          | -                       | 2024-2029               |
| <b>Dapil 5</b>                           |                      |                         |                         |
| Kadarlusman                              | Laki – Laki          | 2019-2024               | 2024-2029               |
| R. Yuwanto                               | Laki – Laki          | 2019-2024               | 2024-2029               |
| <b>Dapil 6</b>                           |                      |                         |                         |
| Rukiyanto                                | Laki – Laki          | 2019-2024               | 2024-2029               |
| Joko Susilo                              | Laki – Laki          | 2019-2024               | 2024-2029               |
| Fajar Rinawan                            | Laki – Laki          | 2019-2024               | -                       |
| Jumlah                                   |                      | 19                      | 14                      |
| L/P                                      |                      | P : 6 (31,6%)<br>L : 13 | P : 3 (21,4%)<br>L : 11 |

Sumber: KPU Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan terus berlanjut, meskipun sudah ada aturan kuota. Pada tahun 2019, dari 19 anggota yang terpilih, 6 adalah perempuan, atau sekitar 31,6%, namun situasi tersebut jatuh dan menjadi jauh berbeda, yakni dengan hanya 3 perempuan dari 14 anggota yang terpilih, sehingga proporsinya menjadi rendah sekitar 21,4%. Politisi tersebut antara lain:

1. Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom. dari Dapil 1,
2. Hanik Khoiru Solikah dari Dapil 2,
3. Lely Purwandari dari Dapil 3.

Sedang anggota DPRD perempuan periode tahun 2019-2024 dari daerah pilih 1, Novi Sukmawati Ayunigrum dan dari daerah pilih 4, Nungki Sundari tidak mencalonkan diri kembali. Dyah Ratna Harimurti anggota dewan periode 2019-2024 mencalonkan diri kembali namun kalah pada pemilu legislatif tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan afirmatif, jumlah perempuan

yang terpilih di politik lokal Kota Semarang masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, data juga menunjukkan peluang petahana laki-laki untuk terpilih lagi lebih besar, yakni sebesar 69% , sedangkan petahana perempuan hanya sebesar 50%.

Rendahnya jumlah perempuan di DPRD Kota Semarang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini masih belum cukup untuk mencapai keterwakilan yang lebih adil. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, tidak hanya untuk memenuhi kuota, tetapi juga untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi perempuan dalam dunia politik.

Tahun 2024 dianggap sebagai tahun terberat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilu, karena menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan dinamika politik internal dan eksternal, perubahan demografis, serta persaingan yang semakin ketat dalam mempertahankan dukungan elektoral. Secara internal, PDIP harus mengelola stabilitas partai, termasuk menjaga soliditas di tengah potensi perpecahan akibat perbedaan kepentingan politik di antara kader dan faksi-faksi di dalamnya. Sementara itu, dari sisi eksternal, persaingan antarpolisi semakin ketat, dengan meningkatnya kekuatan partai oposisi yang berusaha menarik basis pemilih tradisional PDIP. Selain itu, perubahan demografis menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan meningkatnya jumlah pemilih muda yang cenderung lebih kritis dan tidak terikat oleh loyalitas partai lama. Generasi ini lebih mempertimbangkan isu-isu aktual seperti transparansi pemerintahan, kesejahteraan ekonomi, serta kebijakan yang berdampak langsung

pada kehidupan mereka. Jika PDIP tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka mempertahankan dominasi politiknya di berbagai daerah akan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, pemilu 2024 menjadi momen krusial bagi PDIP untuk menyesuaikan strategi politiknya, memperkuat konsolidasi internal, serta menghadirkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

PDI Perjuangan di Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender dalam pemilu legislatif 2024 dengan menominasikan jumlah kandidat perempuan yang signifikan, mencapai sekitar 35% dari total nominasi partai, yang melebihi batas minimal 30% yang ditetapkan oleh regulasi kuota gender. Inisiatif ini mencerminkan strategi partai dalam mempromosikan partisipasi perempuan di tingkat legislatif, yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kuota tetapi juga untuk merespons kebutuhan representasi yang lebih seimbang yang bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan secara positif.

PDI Perjuangan tidak hanya berfokus pada nominasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kandidat perempuan melalui program pelatihan yang mencakup strategi kampanye, manajemen publik, dan pengetahuan legislatif. Dengan demikian, partai politik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kandidat perempuan tidak hanya terpilih, tetapi juga berhasil menjalankan peran legislatif mereka secara efektif. Untuk mencapai hal ini, partai perlu menyediakan dukungan strategis yang memadai, seperti pelatihan kepemimpinan, akses ke jaringan politik yang lebih luas, serta kesempatan untuk menempati posisi yang memungkinkan mereka menyuarakan dan memajukan agenda kesetaraan gender.

Tanpa upaya yang serius dari partai dalam mendukung keterlibatan perempuan, kebijakan yang berorientasi pada keadilan gender dapat terhambat dalam proses legislatif (UNDP, 2012).

Upaya PDI Perjuangan untuk mendukung keterwakilan perempuan di politik Indonesia tidak hanya fokus pada pemenuhan kuota, melainkan juga termasuk inisiatif pelatihan, pendidikan politik, dan dukungan kampanye yang khusus ditujukan untuk kandidat perempuan. Ini menunjukkan komitmen mendalam partai dalam mengembangkan kapasitas politik perempuan. Pelatihan yang disediakan meliputi berbagai aspek kepemimpinan dan keterampilan politik yang esensial, seperti strategi kampanye, komunikasi efektif, dan pengelolaan tim kampanye. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan tentang proses politik dan pentingnya partisipasi aktif, melalui seminar dan lokakarya yang memperdalam pengetahuan mereka tentang struktur pemerintahan dan hak-hak politik. Selain itu, dukungan kampanye dari PDI Perjuangan meliputi bantuan finansial, akses ke media, dan jaringan dukungan kampanye, yang vital untuk meningkatkan visibilitas dan efektivitas kandidat perempuan di arena politik.

Langkah-langkah yang diambil partai politik tidak hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan, tetapi juga untuk memperkuat peran mereka dalam pembuatan kebijakan, mencerminkan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sebagai contoh, PKS di Kota Medan telah menjalankan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan politik dan

peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, PKS juga memastikan representasi perempuan dalam kepemimpinan partai dan pencalonan legislatif, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif (Siregar, 2023).

Kebijakan afirmatif yang diterapkan oleh PDI Perjuangan di Kota Semarang, bersama dengan dukungan legislatif yang luas untuk meningkatkan keterpilihan perempuan, mencerminkan komitmen partai dalam menghapus hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan dalam politik serta mendorong kesetaraan gender secara lebih luas. Kebijakan afirmatif ini mencakup berbagai strategi, termasuk penerapan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan, yang menetapkan persentase minimum kandidat perempuan yang harus dinominasikan oleh partai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh posisi legislatif. Di Kota Semarang, kebijakan ini menunjukkan komitmen serius PDI Perjuangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia politik. Dukungan legislatif juga memperluas menuju upaya-upaya seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan politik, penyediaan sumber daya kampanye, dan akses ke platform media untuk meningkatkan visibilitas perempuan. Ini termasuk workshop, seminar, dan sesi mentoring yang khusus dirancang untuk mempersiapkan perempuan menghadapi tantangan politik dan memperkuat kemampuan mereka dalam berkompetisi dalam pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun PDI Perjuangan telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan afirmatif dan program pendukung, tantangan dalam mewujudkan representasi yang setara di lembaga legislatif masih tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana pada Pemilu Legislatif Kota Semarang 2024.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Kota Semarang Tahun 2024?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif Kota Semarang 2024.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman teoritis tentang dinamika gender dalam konteks politik, khususnya terkait keterwakilan politisi perempuan. Hal ini mengacu pada teori gender dan politik yang menganalisis bagaimana konstruksi sosial dan budaya memengaruhi peran perempuan dalam politik.

- b. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana perempuan menggunakan strategi politik dalam konteks demokrasi kompetitif, sesuai dengan teori kontestasi dan kompetisi politik.
- c. Analisis ini mendukung pemahaman tentang bagaimana politisi perempuan memanfaatkan logika manfaat rasional untuk mengoptimalkan dukungan pemilih.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh partai politik untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung kandidat perempuan, termasuk pelatihan, pengalokasian sumber daya, dan penempatan strategis dalam daftar calon.
- b. Temuan dapat mempengaruhi program pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberagaman gender dalam politik dan mengatasi bias gender yang masih ada.
- c. Dengan peningkatan keterwakilan perempuan, diharapkan ada perubahan substansial dalam kebijakan publik yang lebih memperhatikan isu gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan di tempat kerja, dan kebijakan keluarga.
- d. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk advokasi reformasi kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan yang lebih besar di semua tingkatan pemerintahan.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan untuk membandingkan fokus, pendekatan, dan temuan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Terdapat tiga penelitian utama yang menjadi rujukan dan titik banding dalam mengembangkan fokus analisis terhadap keterpilihan politisi perempuan petahan dari PDI Perjuangan di Kota Semarang pada Pemilu Legislatif tahun 2024.

#### **1. Kharisma Adhiarya (2022), “Upaya Pemenuhan Kuota Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif di Kota Semarang”**

Penelitian ini menganalisis strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif di Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua partai menghadapi kendala individual, struktural, dan kultural dalam proses tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Adhiarya (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian dilakukan di Kota Semarang. Penelitian pun membahas keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Penelitian juga menyoroti peran partai politik dalam menerapkan kebijakan kuota 30% calon perempuan. Termasuk di dalamnya hambatan yang dihadapi politisi

perempuan dalam menghadapi pemilu legislatif, baik hambatan struktural, kultural, maupun individual. Penelitian pun dilakukan dengan pendekatan yang sama, yakni dengan pendekatan kualitatif agar penelitian mampu menggali data secara holistik, yakni menyeluruh dan mendalam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah titik analisisnya, penelitian Kharisma Adhiarya menyoroti proses pencalonan dan pemenuhan kuota, sedang penelitian ini menitikberatkan pada faktor keterpilihan politisi perempuan, khususnya yang berstatus petahana. Selain itu, politisi yang diteliti oleh Kharisma adalah politisi dari PDI-P dan PKS sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada PDI-P saja. Penelitian ini tidak membedakan antara caleg petahana dan non-petahana, serta tidak menyoroti pengaruh persepsi publik maupun pemberitaan media, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang membahas faktor apa saja yang membuat politisi perempuan tersebut terpilih.

## **2. Dwi Rahayu (2019) “Respon Partai dalam Pemenuhan Kuota Perempuan pada Pencalonan Anggota Legislatif di Kota Semarang”**

Studi ini mengevaluasi bagaimana partai politik, khususnya PDI Perjuangan, merespons kebijakan afirmatif terkait kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun partai mendukung kebijakan tersebut, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti budaya patriarki dan kurangnya kader perempuan yang berkualitas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ada dalam hal fokus aktor, yakni PDIP, beserta isu yang dibahas, yakni keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif. Selain itu, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan juga sama menyoroti peran strategis partai dalam mengusung perempuan sebagai caleg.

Sedang perbedaannya, Dwi Rahayu lebih mengkaji respons kebijakan afirmatif yang diterima oleh partai, bukan pada hasil akhir pemilu. Penelitian ini pun tidak membahas perbedaan keterpilihan politisi perempuan yang petahana dan non-petahana. Di samping itu, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dengan menggunakan perspektif internal dan eksternal, penelitian ini tidak menggunakan perspektif tersebut.

### **3. Juniar Laraswanda Umagapi (2020) “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Prospek”**

Penelitian ini membahas peningkatan jumlah keterpilihan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019, yang mencapai angka tertinggi dalam sejarah parlemen Indonesia. Namun, studi ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti budaya patriarki dan proses seleksi partai politik yang kurang mendukung keterwakilan perempuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah temanya secara umum, yakni keterpilihan perempuan di parlemen beserta dengan identifikasi hambatan sistemik yang serupa, meskipun

kebijakan kuota sudah diterapkan. Selain itu dibahas pula dampak patriarki dalam proses rekrutmen partai.

Perbedaannya, fokusifiks Juniar Umagapi ada pada level nasional, sedang penelitian ini di daerah, yakni Kota Semarang. Penekanan dalam penelitiannya pun berbeda, penelitian ini menekankan dampak representasi perempuan, sementara penelitian yang akan dilakukan menyoroti faktor keterpilihan petahan secara spesifik. Kemudian pula, penelitian yang dilakukan Juniar Umagapi tidak membahas strategi internal guna mendapatkan kursi di parlemen.

## **1.6. Landasan Teori**

### **1. Teori Gender dan Politik**

Teori gender dan politik tidak hanya mendeskripsikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang biologis dan sosial, tetapi juga mengkaji struktur kekuasaan yang mempengaruhi keterlibatan politik perempuan. Menurut Marzuki (2015), gender adalah konstruksi sosial yang melahirkan norma, peran, dan ekspektasi tertentu yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Struktur patriarki ini seringkali memarginalkan perempuan dalam ranah politik dan membatasi akses mereka ke dalam proses pengambilan keputusan politik.

Teori gender dan politik bukan hanya membedakan antara gender sebagai konstruksi sosial dan biologis, tetapi lebih penting lagi, teori ini menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan berbasis gender, khususnya patriarki, mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Menurut teori ini,

patriarki adalah sistem kekuasaan yang memberikan prioritas kepada laki-laki dalam semua aspek kehidupan sosial dan politik, yang pada gilirannya menciptakan hambatan signifikan bagi perempuan yang mencari atau menjabat posisi kepemimpinan politik. Patriarki mendukung norma-norma dan praktik yang menghambat akses perempuan ke dalam arena politik melalui berbagai cara:

A. Eksklusi Institusional

Struktur politik dan hukum sering didesain untuk membatasi partisipasi perempuan, misalnya melalui aturan kandidasi dan kuota yang tidak memadai yang tidak mendukung keterwakilan perempuan yang seimbang.

B. Bias Sosial dan Kultural

Persepsi masyarakat yang mendalam tentang peran gender mengharuskan perempuan memprioritaskan peran domestik daripada ambisi politik. Stereotip ini sering kali mencerminkan dan memperkuat di media dan dalam retorika publik, yang mempengaruhi persepsi pemilih terhadap kelayakan dan kemampuan kepemimpinan perempuan.

C. Akses Terbatas pada Sumber Daya

Perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya yang penting untuk kampanye politik, seperti pendanaan, jaringan pendukung, dan pelatihan politik, yang lebih mudah diakses oleh kandidat laki-laki karena jaringan patriarki yang sudah ada.

Patriarki sebagai sistem sosial di mana laki-laki mendominasi perempuan, mendefinisikan dan mempertahankan posisi perempuan dalam politik sebagai posisi yang lebih rendah. Menurut Carol Gilligan (2018) mengidentifikasi bahwa patriarki beroperasi melalui enam struktur sosial yang mencakup rumah tangga, pekerjaan berbayar, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya. Dalam konteks politik, ini berarti bahwa patriarki dapat mempengaruhi segala hal mulai dari ketidakseimbangan representasi gender di lembaga legislatif hingga cara media menggambarkan kandidat perempuan. Lebih lanjut Cathy Newman (2018) menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk mencerminkan demokrasi yang inklusif, tetapi juga untuk mengubah konten kebijakan yang dihasilkan. Ia berargumen bahwa tanpa representasi yang memadai, suara perempuan dan isu-isu yang secara khusus mempengaruhi mereka sering diabaikan.

Maria Shriver (2014) menunjukkan bahwa kebijakan kuota merupakan satu cara untuk mengatasi hambatan struktural yang dihasilkan oleh patriarki, dengan memberikan perempuan kesempatan yang lebih baik untuk terpilih. Dengan menggabungkan beberapa pandangan teori gender dan politik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur patriarki mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan petahana dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Kota Semarang 2024. Teori ini membantu mengungkap bagaimana stereotip gender, peran domestik, dan persepsi masyarakat membatasi elektabilitas

politisi perempuan, sekaligus menawarkan kerangka untuk memahami cara-cara yang mungkin dilakukan untuk menantang dan mengubah norma-norma tersebut dalam praktik politik.

## **2. Teori Kontestasi dan Kompetisi Politik**

Teori kontestasi dan kompetisi politik secara mendalam mengungkap bagaimana struktur dan dinamika dalam politik mempengaruhi partisipasi perempuan. Menurut Robert Dahl (2013) dalam teorinya tentang *Polyarchy*, kompetisi politik merupakan elemen esensial dalam demokrasi yang memberikan pemilih kemampuan untuk memilih di antara alternatif yang berbeda. Dalam konteks perempuan, mereka seringkali harus menghadapi stereotip gender dan ekspektasi sosial yang membentuk hambatan signifikan dalam proses politik. Strategi kampanye yang efektif dan penggunaan pencitraan yang cermat oleh perempuan tidak hanya bertujuan untuk mengkomunikasikan kompetensi dan visi politik mereka, tetapi juga untuk menantang dan mengubah narasi tradisional yang sering kali membatasi mereka hanya pada peran-peran tertentu. Dalam menghadapi kompetisi politik, penting bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pelengkap dalam keberagaman gender, tetapi pemimpin yang substansial dengan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan inisiatif yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Hambatan internal yang dihadapi perempuan dalam politik seringkali berakar pada struktur dan dinamika internal partai mereka

sendiri. Misalnya, kurangnya dukungan dari partai politik, yang mungkin lebih cenderung mengalokasikan sumber daya signifikan kepada kandidat laki-laki, sering kali membuat kandidat perempuan kurang terlihat dan kurang kompetitif. Selain itu, akses terbatas pada sumber daya kampanye, seperti pendanaan, pelatihan, dan media, mengekang kemampuan mereka untuk membangun visibilitas dan kredibilitas yang efektif.

Selain hambatan internal, ada juga hambatan eksternal yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu. Sistem pemilu, misalnya, dapat memiliki dampak besar terhadap peluang perempuan untuk terpilih. Sistem proporsional dengan daftar tertutup bisa lebih menguntungkan perempuan, karena partai cenderung menempatkan perempuan di posisi yang lebih menonjol untuk memenuhi kuota gender. Namun, di banyak sistem mayoritas, bias dan stereotip gender dari pemilih sering mengarah pada keraguan terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan, yang mempersulit mereka untuk bersaing.

Menghadapi realitas ini, strategi kampanye yang efektif menjadi krusial bagi perempuan dalam politik. Pencitraan yang efektif, misalnya, membantu mengubah persepsi publik tentang perempuan sebagai pemimpin yang kompeten. Pembentukan koalisi politik juga penting, di mana aliansi antar partai atau dengan kelompok kepentingan dapat memperluas dukungan dan sumber daya yang tersedia. Melalui koalisi,

perempuan dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang lebih luas untuk mengampanyekan masalah yang resonan dengan pemilih.

Selain itu, sangat penting bagi perempuan dalam politik untuk menavigasi stereotip gender dan ekspektasi sosial dengan bijak. Mereka perlu mengkomunikasikan kompetensi, visi politik, dan komitmen terhadap isu-isu yang penting dengan cara yang menantang narasi tradisional. Dalam menghadapi kompetisi politik, perempuan harus menunjukkan bahwa mereka bukan hanya simbol keberagaman gender, tetapi pemimpin substantif yang mampu memajukan kebijakan dan inisiatif yang mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Kombinasi dari strategi ini, ketika diterapkan secara efektif, dapat memecah hambatan yang selama ini menghambat partisipasi penuh perempuan dalam politik, memungkinkan mereka untuk memainkan peran legislatif yang lebih aktif dan berdampak.

### **3. Hambatan Internal dan Eksternal**

Hambatan internal berkaitan dengan faktor-faktor dalam partai politik atau kondisi pribadi perempuan:

#### **1) Kurangnya Dukungan Partai**

Menurut teori keterwakilan kritis oleh Dahlerup dan Leyenaar (2013), struktur kepemimpinan yang didominasi laki-laki dalam partai politik sering kali menyebabkan alokasi sumber daya kampanye yang tidak

merata antara kandidat laki-laki dan perempuan. Ini termasuk akses terbatas pada pendanaan, pelatihan, dan waktu bicara di media.

## 2) Stereotip Gender

Virginia Woolf dalam karyanya membahas bagaimana norma-norma sosial dan stereotip gender menganggap perempuan kurang cocok untuk politik, yang dianggap membutuhkan sifat agresif atau dominan yang secara tradisional dikaitkan dengan laki-laki.

Hambatan eksternal berasal dari luar individu, melibatkan sistem pemilu dan pemilih:

- 1) Sistem Pemilu: Pippa Norris (2004) dalam karyanya menunjukkan bahwa jenis sistem pemilu berpengaruh besar terhadap peluang perempuan untuk terpilih. Sistem proporsional, menurut Norris, cenderung lebih menguntungkan perempuan dibandingkan sistem pluralitas/mayoritas yang biasanya mendukung kandidat laki-laki yang sudah mapan dan berpengaruh.
- 2) Bias Pemilih: Anne Phillips dalam "Politics of Presence" (1995) menguraikan bagaimana bias gender dalam masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pemilih, dengan banyak pemilih yang memiliki ekspektasi bahwa pemimpin harus memiliki kualitas-kualitas yang secara tradisional dikaitkan dengan laki-laki.
- 3) Akses ke Media dan Teknologi: Menurut Jennifer Lawless (2012), perempuan sering kali mendapatkan akses yang lebih sedikit ke media dan teknologi, yang krusial dalam politik modern. Hal ini membatasi

kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan pesan dan membangun citra efektif.

### **1.7. Operasionalisasi Konsep**

#### **1. Keterpilihan Politisi Perempuan**

Keterpilihan mengacu pada kemampuan politisi perempuan untuk terpilih dalam pemilihan legislatif. Dapat diukur melalui jumlah suara yang diperoleh oleh politisi perempuan dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif Kota Semarang 2024, dan apakah mereka berhasil mendapatkan kursi legislatif.

#### **2. Faktor Internal**

Faktor internal merujuk pada variabel-variabel dalam partai yang secara langsung mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan. Berdasarkan teori-teori yang relevan, faktor internal yang akan dioperasionalkan adalah:

##### **1) Dukungan Partai**

Mengukur sejauh mana partai memberikan dukungan kepada kandidat perempuan, termasuk promosi dalam daftar kandidat dan dukungan retorika dari kepemimpinan partai. Pengukuran ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kandidat perempuan dan pengurus partai serta analisis dokumen partai.

##### **2) Alokasi Sumber Daya Kampanye**

Menilai distribusi sumber daya kampanye, seperti dana, materi promosi, dan akses media yang diberikan kepada politisi perempuan. Data ini akan dikumpulkan melalui wawancara dan review dokumen keuangan dan strategis partai.

##### **3) Pelatihan yang Disediakan oleh Partai**

Melakukan identifikasi dan mengevaluasi pelatihan yang disediakan partai untuk persiapan kandidat perempuan, termasuk pelatihan komunikasi politik, strategi kampanye, dan manajemen kampanye.

Informasi ini akan diambil dari wawancara dengan peserta pelatihan dan analisis dokumen pelatihan partai.

### 3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah kondisi atau situasi di luar kontrol partai yang mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan.

#### 1) Sistem Pemilu

Analisis terhadap sistem pemilu yang diterapkan, seperti sistem proporsional versus mayoritas, dan bagaimana ini mempengaruhi peluang politisi perempuan untuk terpilih, berdasarkan studi literatur dan data historis.

#### 2) Persepsi Pemilih

Sikap dan pandangan pemilih terhadap kandidat perempuan, diukur melalui survei dan studi opini publik.

#### 3) Cakupan Media

Evaluasi terhadap representasi dan pemberitaan media terhadap politisi perempuan selama periode kampanye, yang dianalisis melalui kajian isi media.

### 1.8. Kerangka Berpikir

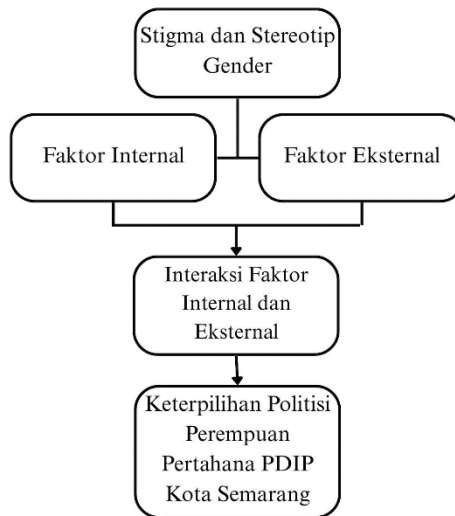
Dalam memahami keterpilihan politisi perempuan, khususnya dari partai politik dengan basis massa pemilih yang besar di Kota Semarang seperti PDI Perjuangan, diperlukan suatu kerangka berpikir yang mampu menguraikan keterkaitan antara konsep, teori, dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan konseptual yang menjembatani teori-teori yang telah dikaji dan fenomena empiris yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini tidak hanya berbicara mengenai keterwakilan politik perempuan secara kuantitatif, tetapi juga lebih jauh menjelaskan bagaimana

proses politik, relasi kuasa, serta dukungan struktural dan kultural turut membentuk hasil pemilu, terutama bagi politisi petahana. Untuk itu, teori yang digunakan meliputi teori gender dan politik serta teori kontestasi dan kompetisi politik. Teori-teori ini menjadi dasar untuk mengurai faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Faktor internal mencakup dukungan dari partai politik, seperti penempatan dalam daftar calon, akses terhadap sumber daya kampanye, dan kepercayaan partai terhadap kapasitas kader perempuan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sistem politik yang digunakan, persepsi publik terhadap perempuan, dan bagaimana media membingkai pencalonan mereka. Status petahana yang dimiliki oleh subjek penelitian juga mempengaruhi elektabilitas karena mengandung modal politik seperti popularitas, jaringan, dan pengalaman legislasi. Namun, modal ini tetap harus diuji dalam konteks politik yang dinamis dan kompetitif. Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam alur seperti berikut:

Gambar 2. Kerangka Berpikir



Gambar di atas menjelaskan bahwa keterpilihan politisi perempuan petahana dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor, yakni faktor internal dan eksternal, sesuai dengan teori kompetisi dan kontestasi politik oleh Robert Dahl. Faktor ini dilatarbelakangi oleh stigma dan stereotip gender yang telah menjalar di banyak lini, seperti yang dikemukakan oleh Marzuki dalam teori gendernya. Hambatan struktural dan kultural patriarki menjadi akar dari tantangan partisipasi perempuan. Hambatan ini berdampak pada persepsi pemilih bagi kandidat perempuan. Dalam faktor internal, hambatan dan dinamika kompleks terdiri dari dukungan partai, sumber daya kampanye, dan pelatihan yang disediakan oleh partai. Faktor dalam partai politik merupakan variabel krusial yang secara langsung dapat memperkuat posisi caleg perempuan, baik dari segi elektabilitas maupun daya saing dalam pencalonan. Faktor eksternal seperti sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemberitaan media juga berkontribusi dalam menentukan hasil keterpilihan. Keseluruhan variabel tersebut

berinteraksi secara kompleks dalam mempengaruhi hasil pemilu bagi politisi perempuan, termasuk mereka yang berstatus petahana.

### **1.9. Argumen Penelitian**

Penelitian ini mengajukan argumen bahwa keterpilihan politisi perempuan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal.

- 1) Faktor Internal mencakup dukungan substantif yang diberikan oleh partai politik kepada kandidat perempuan. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada pelatihan dan sumber daya kampanye, tetapi juga mencakup strategi penempatan kandidat perempuan dalam posisi yang memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dalam daftar calon. Hal ini mencerminkan komitmen partai dalam memprioritaskan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam politik.
- 2) Faktor Eksternal melibatkan bagaimana masyarakat dan media mempersepsikan dan merepresentasikan politisi perempuan. Persepsi publik terhadap kandidat perempuan sering kali dibentuk oleh representasi media yang bisa positif atau negatif, bergantung pada narasi yang dikembangkan. Lebih jauh lagi, faktor eksternal juga termasuk hambatan kultural yang mendalam seperti stereotip gender dan bias patriarki yang terus-menerus mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan.

### **1.10. Metode Penelitian**

#### **1.10.1. Tipe Penelitian**

John W. Creswell dalam bukunya "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" (2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Creswell menekankan bahwa pendekatan ini sangat berguna dalam mempelajari konteks kompleks

dalam setting alamiah, di mana peneliti memfokuskan pada proses alami daripada hasil.

Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendalaminya bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa kompleks dalam interaksi sosial dan politik serta memahami pengalaman subjektif dan persepsi para politisi perempuan, pengurus partai, dan pemilih.

Proses penelitian melibatkan pengumpulan data melalui teknik seperti wawancara mendalam dan analisis dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang kaya dan terperinci mengenai dinamika politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan politisi perempuan, memberikan wawasan yang tidak dapat diungkap melalui metode kuantitatif.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola yang muncul, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell. Analisis ini akan membantu dalam memahami bagaimana faktor internal seperti dukungan partai dan alokasi sumber daya, serta faktor eksternal seperti media dan persepsi publik, berinteraksi dalam konteks politik lokal Kota Semarang.

#### **1.10.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang.

#### **1.10.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Creswell (2014) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan partisipan dilakukan bertujuan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dari subjek yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti. Informan utama terdiri dari tiga politisi

perempuan petahana dari PDI Perjuangan yang berhasil terpilih kembali dalam Pemilu Legislatif Kota Semarang 2024. Ketiganya dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam kontestasi politik serta pengalaman empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh sudut pandang yang lebih kaya dan bervariasi, penelitian ini juga melibatkan masyarakat pemilih sebanyak 2-3 orang untuk setiap politisi, dengan pertimbangan sebagai pemilih aktif yang mengikuti pemilu dan memiliki preferensi politik tertentu. Selain itu, terdapat informan pendukung yang meliputi satu orang pengurus partai PDI Perjuangan Kota Semarang, satu politisi perempuan yang mencalonkan diri namun tidak berhasil terpilih, serta satu perwakilan dari KPU Kota Semarang. Kehadiran informan pendukung ini bertujuan untuk melengkapi data dengan perspektif dari struktur partai, calon yang tidak terpilih, serta penyelenggara pemilu, sehingga analisis terhadap faktor keterpilihan politisi perempuan dapat dilakukan secara komprehensif.

#### **1.10.4. Jenis Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap aktivitas kampanye dan dinamika politik lokal. Data sekunder akan mencakup dokumen partai, laporan hasil pemilu sebelumnya, artikel berita, jurnal akademik, serta dokumen pemerintah yang relevan dengan partisipasi perempuan dalam politik.

#### **1.10.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam dengan politisi perempuan, pemilih, dan pengurus partai Kota Semarang. Wawancara akan difokuskan pada pengalaman politisi perempuan dalam menghadapi hambatan dan strategi mereka untuk meningkatkan keterpilihan. Selain wawancara digunakan pula dokumentasi dengan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

#### 1.10.6. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Sesuai dengan rekomendasi Miles, Huberman, dan Saldaña dalam buku mereka "*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*" (2014), proses analisis ini akan mencakup beberapa langkah utama:

##### 1) Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana data mentah dari wawancara dan catatan lapangan akan diringkas dan difokuskan pada aspek-aspek yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan pemilahan, pemilihan, dan pengorganisasian data menjadi format yang dapat dikelola, memudahkan identifikasi pola dan tema penting.

##### 2) Kategorisasi

Data yang telah direduksi akan dikategorikan. Kategorisasi ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan kesamaan dan perbedaan untuk membentuk kategori yang berarti dan deskriptif. Proses ini sangat penting untuk menyusun kode dan tema yang akan muncul dari data. Setiap kategori akan mencerminkan aspek-aspek penting dari data yang berkaitan dengan teori gender, representasi politik, dan partisipasi politik.

##### 3) Sintesis

Data yang telah dikategorikan kemudian langkah berikutnya adalah sintesis data, yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyusun data yang telah dikategorikan menjadi suatu kesatuan yang koheren. Sintesis ini akan membantu dalam membangun narasi yang jelas mengenai temuan dan bagaimana temuan tersebut berhubungan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

#### 4) Penemuan Tema

Peneliti akan mengidentifikasi dan mengekstrak tema-tema penting yang muncul dari data. Tema-tema ini adalah representasi dari pola atau masalah yang signifikan dalam data yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Penerapan teori grounded dalam proses ini, seperti yang dijelaskan oleh Charmaz dalam "Constructing Grounded Theory" (2014), akan memastikan bahwa interpretasi dan konklusi yang dihasilkan berakar kuat dalam data yang dikumpulkan.

#### 5) Interpretasi dan Kesimpulan

Data yang telah dianalisis akan diinterpretasikan dalam konteks pertanyaan penelitian. Interpretasi ini akan menghubungkan kembali temuan dengan literatur dan teori yang ada, menjawab rumusan masalah, dan mendiskusikan implikasi dari temuan tersebut terhadap teori gender, politik, dan partisipasi perempuan dalam politik. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis dan interpretasi ini, memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian dan rekomendasi untuk praktik dan penelitian lebih lanjut.

#### **1.10.7. Kualitas Data**

Kredibilitas dan keaslian data dalam penelitian ini akan ditingkatkan melalui triangulasi sumber data dan metode. Informasi dari politisi perempuan, pemilih, dan pengurus partai akan diverifikasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi metode, yang mencakup wawancara dan analisis dokumen, akan digunakan untuk menghasilkan interpretasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam konteks politik lokal Kota Semarang.